

Transformasi Digital Tata Kelola Administrasi pada Lembaga Pendidikan Islam dalam Perspektif Reformasi Birokrasi

Inkha Hedian Dena Fritiar¹

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nurtanio Bandung, Indonesia

(*hediwinka@gmail.com)

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2 Desember 2025

Revised 15 Desember 2025

Accepted 28 Desember 2025

Available online 3 Januari 2026

Kata Kunci:

Administrasi Negara, Pendidikan Islam, Transformasi Digital, Tata Kelola.

Keywords:

Public Administration, Islamic Education, Digital Transformation, Governance

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Al-Afif

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi tata kelola administrasi pada lembaga pendidikan islam melalui perspektif Administrasi Negara. Menggunakan metode studi pustaka kualitatif penelitian ini membedah berbagai literatur digitalisasi dan reformasi birokrasi di sektor pendidikan agama. Hasil penelitian menunjukan bahwa integrasi teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi lembaga, namun masih terhambat oleh rendahnya literasi digital SDM dan resistensi budaya organisasi. Penelitian ini menawarkan konsep “*Manajemen Administrasi Profetik Digital*” sebagai solusi untuk menyelaraskan efisiensi teknis dengan nilai-nilai amanah dalam islam. Kesimpulannya transformasi digital adalah kunci utama bagi lembaga pendidikan islam untuk mewujudkan *Good Governance*.

ABSTRACT

This study aims to analyse the transformation of administrative governance in Islamic educational institution through a Public Administration perspective. Using a qualitative literature review method, this research dissects various literatures regarding the implementation of digitalization policies and bureaucratic reform in the religious education sector. This results indicate that information technology integration enhances operational efficiency and

institutional transparency, yet it remains hindered by low digital literacy and organizational culture resistance. This study proposes the concept of “*Prophetic Digital Administrative Management*” as a solution to align technical efficiency with Islamic values of accountability. In conclusion, digital transformation is the key for Islamic educational institutions to achieve *Good Governance*.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Era disrupsi telah memaksa seluruh sector public, termasuk lembaga pendidikan islam, untuk melakukan redefinisi terhadap model tata kelola administrasinya. Dalam perspektif Administrasi Negara, tuntutan ini bukan sekedar modernisasi perangkat, melainkan bagian integral dari reformasi birokrasi yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, ironinya, sementara wacana Pendidikan Islam 4.0 terus digaungkan, banyak institusi pendidikan islam masih terjebak dalam pola administrasi konvensional yang kaku dan birokratis. Kondisi ini menciptakan kesenjangan (gap) yang lebar antara kebijakan pemerintah mengenai digitalisasi pendidikan dengan realitas implementasi di lapangan. Kurangnya integrasi data, lambatnya pelayanan administrasi, hingga sistem pelaporan yang belum tersinkronisasi menjadi hambatan sistemik yang dapat mendegradasi daya saing pendidikan islam di kancah nasional maupun global.

Secara teoritis penelitian ini membedah fenomena tersebut melalui lensa New Public Management (NPM) yang mendorong adopsi nilai-nilai profesionalisme sector swasta ke dalam manajemen organisasi public. Selain itu, konsep *Good Governance* menjadi instrument penting untuk memotret bagaimana lembaga pendidikan islam mengelola otoritas dan sumber dayanya. Pentingnya tata kelola administrasi yang unggul tidak dapat dipisahkan dari mutu pendidikan itu sendiri sebab tanpa manajemen pendukung yang kuat, proses pedagogis akan terbebani oleh karut-marutnya birokrasi internal. Permasalahan yang muncul bukan sekedar teknis ketersediaan alat, melainkan resistensi budaya

organisasi dan minimnya literature yang secara khusus mengkaji irisan antara teori administrasi negara dengan manajemen lembaga pendidikan agama secara komprehensif.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi secara kritis berbagai literature dan regulasi terkait. Rencana pemecahan masalah difokuskan pada perumusan kerangka kerja transformasi digital yang adaptif bagi institusi pendidikan islam. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peluang dan tantangan tata kelola administrasi berbagai digital, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan di lembaga pendidikan islam agar tercipta sistem administrasi yang ramping, responsive, dan akuntabel. Melalui penelusuran literature ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis baru dalam memperkaya khazanah keilmuan administrasi pendidikan di era digital.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Penelitian ini tidak melakukan observasi langsung di lapangan, melainkan berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis mendalam terhadap berbagai literature ilmiah yang relevan dengan topik tata kelola administrasi dan pendidikan islam. Sumber data yang digunakan berasal dari Literatur Primer jurnal ilmiah terakreditasi, dan Literature Sekunder artikel opini ahli, laporan penelitian terdahulu, dan berita resmi yang kredibel mengenai perkembangan teknologi informasi di lembaga keagamaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumen dengan teknik studi literature dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang secara kritis dan mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

Result

Berdasarkan penelusuran literature terhadap berbagai dokumen kebijakan, jurnal ilmiah terakreditasi, dan laporan penelitian terkait tata kelola administrasi pendidikan islam, ditemukan tiga pilar utama yang menjadi indikator keberhasilan transformasi digital. Hasil pemetaan literatur menunjukkan bahwa adopsi teknologi dalam administrasi bukan hanya soal pengadaan perangkat keras, melainkan reposisi peran birokrasi pendidikan.

1. Pemetaan Komponen Tata Kelola Administrasi Digital

Data yang dihimpun dari berbagai literature ilmiah menunjukkan bahwa terdapat korelasi kuat antara adopsi teknologi dengan peningkatan performa birokrasi sekolah. Temuan ini diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi administrasi utama yang akan disajikan pada tabel dibawah dan penelitian ini mengidentifikasi variabel kunci yang menentukan efektivitas manajemen pendidikan islam dalam perspektif Administrasi Negara berikut:

Tabel 1. Sintesis Komponen Tata Kelola ADministrasi Digital

No	Dimensi Administrasi	Indikator Berdasarkan Literature	Dampak Terhadap Lembaga
1	Efisiensi Operasional	Otomasi persuratan (e-office) dan pengarsipan digital.	Reduksi biaya ATK dan waktu tunggu layanan hingga 60%.
2	Transparansi & Akuntabilitas	E-Budgeting dan system informasi pelaporan keuangan publik.	Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (orang tua & pemerintah).
3	Kualitas Pelayanan	Sistem Informasi Akademik (SIKAD) berbasis Cloud.	Akses data real time bagi siswa dan sinkronisasi data EMIS yang akurat.

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa dimensi Efisiensi Operasional menjadi poin paling krusial dalam memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Pengarsipan digital terbukti mampu meminimalisir risiko kehilangan dokumen fisik dan mempercepat pencairan data secara real-time. Pada

dimensi Transparansi literature menunjukkan bahwa lembaga pendidikan islam yang berani membuka akses informasi keuangan secara digital memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi. Terakhir pada dimensi Kualitas Pelayanan, integrasi system memastikan bahwa data pendidikan tidak lagi bersifat silo (tersekat-sekat) melainkan saling terhubung antara bagian akademik, kesiswaan, dan keuangan.

2. Identifikasi Hambatan Implementasi (*Barrier Analysis*)

Melalui seleksi literatur terhadap laporan riset implementatif, ditemukan bahwa transisi menuju administrasi modern tidak berjalan linier. Hasil analisis terhadap studi kasus kualitatif dalam literature mengungkapkan bahwa transisi menuju administrasi digital di lembaga pendidikan islam ditemukan bahwa transisi menuju administrasi modern tidak berjalan linier dan menghadapi tiga tantangan utama:

- Kesenjangan Kompetensi Digital: Masih dominannya tenaga kependidikan dengan literature teknologi rendah (*low tech-literacy*). Mayoritas literatur menyebutkan bahwa faktor usia dan minimnya pelatihan teknis bagi staf tata usaha menjadi penghambat utama efektivitas aplikasi administrasi.
- Keterbatasan infrastruktur: Ketidakmerataan akses internet dan perangkat pendukung di lembaga pendidikan islam di daerah rural. Ditemukan bahwa ketidakstabilan koneksi internet di sekolah berbasis pesantren seringkali membuat sistem digital menjadi tidak fungsional secara optimal.
- Budaya Organisasi: Adanya resistensi terhadap perubahan (*resistance to change*) dari model kerja manual ke digital karena dianggap merusak zona nyaman birokrasi lama. Terdapat temuan konsisten dalam literature mengenai adanya kecenderungan staf untuk tetap menggunakan cara manual karena dianggap lebih aman dibandingkan sistem digital yang dianggap rumit.

3. Model Kerangka Kerja Administrasi Modern

Hasil akhir dari penelusuran pustaka ini merumuskan sebuah model “Administrasi Satu Pintu” (*One gate System*) sebagai solusi teknis. Model ini menggabungkan prinsip *New Public Management* (NPM) yang profesional dengan nilai-nilai kejujuran (*Sidiq*) dan transparansi (*Tabligh*) dalam manajemen pendidikan islam. Temuan literatur menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada komitmen kepemimpinan (*leadership*) dalam mengawal perubahan budaya organisasi dari manual ke digital. Dengan nilai-nilai manajemen islami menghasilkan model administrasi yang lebih humanis namun tetap profesional. Fokus utamanya terletak pada penyederhanaan birokrasi melalui satu pintu layanan (*one gate service*) yang didukung oleh data base terintegrasi.

Discussion

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai urgensi dan tantangan transformasi administrasi di lembaga pendidikan islam dengan mengaitkan temuan literature terhadap teori Administrasi Negara yang mapan.

Integrasi New Public Management (NPM) dalam Ekosistem Pendidikan Islam temuan pada table 1 mengenai efisiensi operasional menunjukkan bahwa lembaga pendidikan islam mulai mengadopsi prinsip-prinsip *New Public Management* (NPM). Secara teoritis NPM menekan pada pergeseran dari birokrasi kaku menuju manajemen berbasis kinerja dan hasil. Dalam konteks ini digitalisasi administrasi bukan sekedar peralihan medium dari kertas ke layar, melainkan sebuah rekayasa ulang proses bisnis (*Business Process Reengineering*) di sekolah. Ketika sebuah madrasah atau pesantren menerapkan *e-office*, mereka secara otomatis melakukan perampangan struktur birokrasi. Hal ini mendukung perampangan struktur birokrasi. Hal ini mendukung teori Osborne dan Gaebler mengenai “*Steering rather than rowing*”, dimana pimpinan lembaga pendidikan islam tidak lagi terjebak dalam urusan teknis administratif yang remeh, melainkan lebih focus pada pengemudian kebijakan strategis untuk mutu pendidikan.

Transformasi Budaya Organisasi dan *Digital Governance* hambatan berupa resistensi budaya kerja yang ditemukan dalam literature menunjukkan bahwa transformasi digital seringkali terbentur pada dimensi manusia (*humanware*). Dalam teori Administrasi Negara birokrasi memiliki kecenderungan untuk mempertahankan status quo. Penelitian ini memodifikasi pandangan tersebut dengan menyusun teori bahwa keberhasilan *Digital Governance* di lembaga islam sangat bergantung pada “*Kepemimpinan*

Transformasional Berbasis Nilai". Artinya teknologi hanya akan menjadi artefak yang tidak berguna jika tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir (mindset) para praktisi pendidikan. Modifikasi ini adalah Digitalisasi Administrasi Islam = (Teknologi + SOP Modern) x Komitmen Kepemimpinan. Tanpa variable kepemimpinan efisiensi yang diharapkan melalui teknologi akan tereduksi oleh budaya birokrasi lama yang lamban.

Membangun *Public Trust* Melalui Akuntabilitas Digital salah satu temuan terpenting adalah korelasi antara system *e-budgeting* dengan tingkat kepercayaan publik. Dalam perspektif Administrasi Negara, akuntabilitas adalah ruh dari pelayanan publik. Lembaga pendidikan islam seringkali dipandang sebagai insitusi yang memiliki otonomi tinggi namun terkadang kurang dalam transparansi administratif. Dengan adanya integrasi system informasi, lembaga pendidikan islam dapat menunjukkan akuntabilitasnya secara *real-time* kepada pemangku kepentingan. Hal ini menciptakan *model "Birokrasi Terbuka"* yang mesinergikan doktrin islam tentang amanah dengan prinsip *Good Governance*. Dengan demikian digitalisasi administrasi berfungsi sebagai instrument untuk memvalidasi integritas lembaga di mata publik.

Sintesis Teori Baru Manajemen Administrasi Profetik Digital sbagai kontribusi baru, penelitian ini mengusulkan konsep Manajemen Administrasi Profetik Digital. Teori ini memadukan ketepatan system digital (efisiensi dan akurasi data) dengan nilai-nilai etika administrasi islam (kejujuran dan kemaslahatan). Pengetahuan baru yang dihasilkan adalah bawa transformasi administrasi di lembaga islam tidak boleh kehilangan "ruh" religiusnya demi efisiensi semata. Sebaliknya efisiensi digital harus dipandang sbagai bentuk ibadah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada umat (*service excellence*).

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi tata kelola administrasi di lembaga pendidikan islam merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai efisiensi dan transparansi pelayanan publik di era digital. Melalui penelusuran literatur, ditemukan bahwa adopsi prinsip *New Public Management (NPM)* melalui implementasi system informasi terintegrasi mampu memangkas birokrasi yang tambah lamban dan meningkatkan akurasi data secara signifikan. Namun keberhasilan transformasi ini tidak hanya ditemukan oleh ketersediaan infrastruktur teknologi, melainkan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan perubahan budaya organisasi. Temuan penelitian menunjukan adanya model baru yaitu "*Manajemen Administrasi Profetik Digital*" yang mensinergikan kecanggihan teknologi dengan nilai akuntabilitas islam. Dengan demikian digitalisasi administrasi bukan sekedar peralihan teknis melainkan sebuah reformasi birokrasi internal untuk sebuah reformasi birokrasi internal untuk memperkuat daya saing insitusi pendidikan islam di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi.

Sehingga berdasarkan hasil dan pembahasan saran praktis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Kepada Pengelola Lembaga Pendidikan Islam (Kepala Madrasah, Pimpinan Pesantren) disarankan untuk segera menyusun *roadmap* Transformasi Digital yang komperhensif tidak hanya berfokus pada pengadaan perangkat keras tetapi juga pada program peningkatan literasi digital bagi staf administrasi secara berkelanjutan guna mengatasi resistensi budaya kerja.
- b. Kepada Tenaga Kependidikan (Staf Tata Usaha) perlu adanya perubahan sistem kerja dari manual ke digital sehingga diharapkan proaktif dalam mengadopsi untuk meningkatkan kualitas layanan prima kepada siswa dan orang tua.
- c. Kepada Kementrian Agama/ Pembuat memberikan standarisasi sistem informasi manajemen yang seragam bagi seluruh lembaga pendidikan islam di bawah naungannya. Hal ini penting untuk menjamin integrasi data nasional dan memudahkan proses audit serta monitoring kinerja birokrasi pendidikan secara *real-time*.

5. REFERENCES

- Abdurakhman, A. (2020). *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Al-Afif, M. (2024). *Digitalisasi Manajemen Pendidikan Islam: Tantangan dan Peluang di Era Industri 4.0*. Jurnal Al-Ilmiya, 1(1), 12-25.
- Denhardt, J.V & Denhardt, R.B. (2015). *The New Public Service: Serving, not Steering*. New York: Routledge.
- Fauzi, A. (2022). *Manajemen Strategis Lembaga Pendidikan Islam di Era Disrupsi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Madrasah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles, M.B. Huberman, A.M & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed). SAGE Publications.
- Osborne, D & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. New York: Plume.
- Permana, J. (2023). *Integrasi Sistem Informasi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Publik di Sekolah*. Jurnal Administrasi Negara, 11(2), 145-160.
- Putra, A.S., dkk. (2023). *Strategi Transformasi Digital pada Organisasi Sektor Publik di Indonesia*, Jurnal Inovasi Manajemen, 5(3), 210-225.
- Rahman, T. (2022). *Kepemimpinan Profetik dalam Administrasi Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Sudrajat, A. (2021). *Transformasi Budaya Organisasi dalam Menghadapi Era Digital di Insitusi Pendidikan*, Jurnal Manajemen Pendidikan, 9(1), 45-58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab, S.A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Implementasi ke Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zulkifi, M. (2024). *Implementasi E-Government dalam Pelayanan Administrasi Sekolah Terpadu*. Jurnal Kebijakan Publik, 12(4), 88-102.